

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan mengenai penyediaan aksesibilitas khususnya bagi ibu menyusui dalam pelayanan publik tak lepas dari apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari sebuah pembangunan. Pada konteks pembangunan dikatakan manusia sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan, dengan artian manusia yang membangun dan manusialah yang menikmati hasil dari pembangunan itu. Kemudian dalam pembangunan tidak semata-mata diperuntukan untuk pembangunan berbasis ekonomi melainkan ada aspek yang perlu dipertimbangkan agar tujuan pembangunan sebagai perbaikan kualitas kehidupan dan penghidupan dapat berjalan seutuhnya baik itu sosial budaya dan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan rancangan dan implementasi kebijakan yang memihak kepada ibu menyusui di Kota Pangkalpinang, dan bagaimana penyediaan aksesibilitas bagi ibu menyusui terkait penyediaan kebutuhan mereka di ruang publik, jadi dapat disimpulkan bahwa ketersediaan aksesibilitas pojok laktasi bagi ibu menyusui khususnya pada ruang publik di Kota Pangkalpinang masih sangat minim atau sulit untuk ditemui keberadaannya. Sebagian besar ruang publik yang ada di Kota Pangkalpinang belum menyediakan akses tersebut, karena dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti hanya menemukan akses pojok laktasi yang masih aktif

berada di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang. Untuk akses pojok laktasi yang berada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sudah dinonaktifkan dan dialih fungsikan menjadi ruang arsip.

Adapun faktor yang mempengaruhi aksesibilitas pojok laktasi pada ruang publik di Kota Pangkalpinang, yang *pertama* yaitu penyedia fasilitas sebagai faktor utama, karena peraturan perundang-undangan sudah mempertegas tinggal pihak instansi yang terkait ingin menyediakan atau tidak. Faktor yang *kedua* yaitu rendahnya sosialisasi kepada para ibu menyusui sebagai faktor pendukung. Kurangnya sosialisasi kepada para ibu menyusui membuat kurangnya pemahaman ibu menyusui terkait pemanfaatan akses pojok laktasi. Seperti contoh yang terjadi karena kurangnya minat para ibu menyusui untuk menggunakan fasilitas ruang menyusui yang disediakan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang membuat ruangan tersebut sangat jarang digunakan dan pada akhirnya ruang yang seharusnya digunakan untuk membantu para ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya dirubah fungsi menjadi ruang arsip. Rendahnya pemanfaatan pojok laktasi juga disebabkan oleh faktor kebutuhan, karena pada dasarnya mereka (ibu menyusui) beranggapan bahwa tanpa adanya pojok laktasi mereka juga dapat menyusui dimanapun. Faktor yang *ketiga* yaitu gencarnya penggunaan susu formula juga sebagai faktor pendukung, karena dengan susu formula ketika berada di ruang publik para ibu menyusui

tidak harus memberikan ASI eksklusif kepada bayinya dan menggantinya dengan susu formula.

B. Implikasi Teoretis

Beranjak dari Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons terkait melihat fenomena dalam masyarakat yang merupakan sebuah pendekatan pada suatu tatanan yang teratur dan tidak mengindahkan adanya konflik yang mengacu pada ketidakteraturan. Kemudian pendekatan ini melihat bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri dari sub-sub sistem yang satu sama lain saling memiliki ketergantungan atau saling berkaitan dan diibaratkan dengan organisme tubuh manusia yang apabila salah satu bagian tubuh tidak berfungsi maka bagian-bagian lain juga ikut kehilangan fungsi sebenarnya.

Berbicara keterkaitan antara teori yang digunakan dengan masalah yang diteliti, untuk mengupas masalah yang ada di Kota Pangkalpinang terkait dengan aksesibilitas pojok laktasi bagi ibu menyusui, maka Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons sangat cocok untuk digunakan. Teori ini melihat bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai sebuah sistem yang secara fungsional terintegrasi akan suatu keseimbangan dan memiliki fungsi satu sama lain yang bisa dipisahkan.

Selanjutnya, penggunaan skema AGIL dalam penelitian ini bertujuan sebagai unit analisis bagaimana konteks sistem sosial yang ada di Kota Pangkalpinang dilihat dari penyediaan aksesibilitas pojok laktasi bagi ibu menyusui dalam pelayanan publik maka terungkaplah apa yang mengakibatkan tidak terealisasikan kebutuhan untuk ibu menyusui sebagai “orang yang berkebutuhan khusus”.

Pada poin adaptasi, Kota Pangkalpinang secara jelas memiliki sistem yang paling berpengaruh yakni pemerintah kota dengan segenap satuan kerja perangkat daerahnya. Target adaptasi ialah salah satu lapisan dari masyarakat yakni ibu menyusui, karena adaptasi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ibu menyusui berupa aksesibilitas pojok laktasi dalam pelayanan publik. Dilanjut dengan *goal attainment* atau pencapaian tujuan, dalam konteks Kota Pangkalpinang juga sudah memiliki alat sebagai upaya intervensi sub sistem yakni ketentuan dari kebijakan yang diatur oleh daerah bahkan pemerintah pusat. Kemudian pada poin integrasi sebagai suatu nilai koordinasi dan penguatan sub-sub sistem dalam menciptakan pencapaian tujuan atau alat yang digunakan yakni ketentuan dan kebijakan tadi. Dan yang terakhir yakni *latency* atau pemeliharaan sebagai upaya dalam menjaga keseimbangan dan kesinambungan dengan poin adaptasi, *goal attainment* dan integrasi agar berlangsung secara berkelanjutan.

C. **Saran**

Pada poin ini peneliti tidak bermaksud menjadi orang yang paling paham mengenai ibu menyusui. Peneliti tak lepas dari seorang yang hari ini mulai belajar bagaimana untuk dapat memahami terkait dengan kebutuhan ibu menyusui ketika berada di ruang publik, semua yang peneliti tuliskan dalam tulisan ini semata ingin membuka pemikiran bersama tentang hak ibu dan bayinya yang kurang mendapatkan perhatian melalui elit pemerintah. Ada beberapa poin penting yang menurut peneliti yang perlu dibenahi kembali dalam aksesibilitas pojok laktasi bagi ibu menyusui pada ruang publik di Kota Pangkalpinang yaitu :

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak ibu menyusui terkait dengan kebutuhannya, hak dan keterlibatan ibu menyusui di ruang publik baik itu pemerintah daerah beserta jaringan pemerintah, masyarakat beserta lapisannya, serta pengelola perusahaan dan penyelenggara tempat umum dalam memahami apa yang seharusnya dan senyatanya tentang segala sesuatu mengenai kebutuhan ibu dan bayinya terkait dengan aksesibilitas di ruang publik.
2. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan wajib mengevaluasi atau meninjau ulang bagaimana konteks pembangunan yang sekarang ini agar diarahkan lebih memihak dalam pemenuhan kebutuhan ibu menyusui ketika berada di ruang publik. Aksesibilitas merupakan sebuah bentuk

penghormatan khususnya bagi ibu menyusui sebagai masyarakat sebagai subjek maupun objek dari sebuah pembangunan.

3. Negara sudah mengatur, daerah mempertegas, sistem mengkoordinir sub sistem sebagai eksekutor, maka sudah seharusnya dievaluasi kembali kebijakan yang telah ditetapkan dengan kondisi yang senyatanya di lapangan agar kesamaan hak khususnya untuk ibu menyusui dapat direalisasikan dalam bentuk yang nyata dan memihak kepada ibu dan bayinya ketika berada di ruang publik.

